PENCITRAAN KEKERASAN SADDAM HUSSEIN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PROPAGANDA AMERIKA SERIKAT

Machya Astuti Dewi *

Abstract

Through internet, the United States has been shaping public opinion by the way of presenting Saddam Hussein as regime who commits a violent against women. This case indicated that gender issue gains more significance in international politics.

Kata-kata kunci: propaganda; kekerasan terhadap perempuan; media internet; krisis Irak; feminisasi politik; politik internet.

Pengantar


Selama krisis Irak berlangsung Amerika tidak saja melakukan serangan bensinjata secara fisik. Dalam era cyber Amerika telah menggunakan media internet untuk melakukan perang psikologis dengan Saddam lewat penyataan-pernyataan yang

* Machya Astuti Dewi adalah dosen Fisip, UPN "Veteran", Yogyakarta
memojikan posisi Saddam Hussein. Lewat situs internet para pejabat pemerintah Amerika mengumumkan bahwa berbagai daerah penyergapan ke Irak sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat internasional bahwa langkah penyergapan ke Irak adalah benar.


Amerika dan Krisis Irak dalam Situs Internet

Penggunaan internet sebagai media propaganda politik saat ini kian menggejala. Internet menjadi media informasi yang dapat dengan mudah dan cepat disosialisasi oleh semua kalangan masyarakat melalui batas-batas negara. Karena itulah ada kekhawatiran bahwa penyebaran penggunaan internet untuk akses informasi akan memancing keadaan negaranya, karena arus informasi tidak lagi dapat dikontrol oleh negara. Lepas dari kekhawatiran itu fenomena global menunjukkan justru banyak negara menyesuaikan internet sebagai media politik untuk menghancurkan lawan atau mendapatkan dukungan politik dari masyarakat internasional atas kebijakan yang dialami.


Amerika juga menarikkan bantuan kemanusiaan jika keamanan sudah berhasil ditangkap. Baru itu berupa makanan, obat-obatan dan tempat tinggal. Amerika meawarkan program masyarakat untuk kemanusiaan (oil for food), yaitu menjual minyak dalam jumlah terbatas dan kemudian menggunakan hasil penjualan itu untuk tujuan kemanusiaan. Menurut Amerika Saddam Hussein tidak pernah mengelokasikan dana dari hasil penjualan minyak Irak untuk kepentingan suplai makanan bagi rakyatnya.

Masih dalam situs yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerika di Tokyo tanggal 26 Maret 2003 Collin Powell mengatakan perang di Irak dilakukan dengan persetujuan otoritas internasional dan Amerika Serikat akan berupaya meminimalankan korban rakyat sipil.
Perang di Irag diakibatkan dengan otoritas resolusi PBB nomor 1441 dan menunjuk resolusi sebelumnya, yaitu resolusi nomor 678 dan 687. Karena itu keputusan untuk melakukan perang dengan Irag diakibatkan atas dasar otoritas internasional. Menurut Powell resolusi PBB nomor 1441 sangat kuat dan karena disetujui oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa Irag sudah mendapat kesempatan terakhir.

Rezim yang Kejam pada Perempuan


Departemen Luar Negeri Amerika, Gedung Putih dan Kedutaan Besar Amerika di Islamabad memaparkan penderitaan-penderitaan dan kisah sedih kaum perempuan Irag akibat kekejaman Saddam Hussein dalam beberapa situs berikut ini:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 1</th>
<th>Situs-Situs Internet Pemerintah Amerika Serikat tentang Kekuatan Rezim Saddam Hussein terhadap Perempuan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Office of the Press Secretary, White House</td>
<td>Past Repressions and Activities by Saddam Hussein's Regime</td>
</tr>
<tr>
<td>U.S. Department of State</td>
<td>Iraqi Women Speak Out about Life under Saddam's Dictatorship</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(Sumber: Diolah dari berbagai situs internet)

Melalui situs-situs tersebut pemerintah Amerika mengangkat tema-tema kekejaman Saddam Hussein terhadap perempuan. Dalam
pernyataan di situs internet tanggal 20 Maret 2003 Departemen Luar Negeri Amerika mengemukakan selama hampir 35 tahun memerintah rezim Saddam telah membangkitkan suara perempuan Irak melalui kekerasan dan intimidasi. Kekejaman rezim Saddam terhadap perempuan dilakukan dalam bentuk:

1. Perempuanan kepala
   Dengan dalih memberangi prostitusi, organisasi paramiliter pimpinan Uday Hussein (anak Saddam Hussein) telah memenggal lebih dari 200 kepala perempuan dan melatapkan penggelapan kepala itu ke depan pintu rumah mereka. Beberapa di antara keluarga itu bahkan dipaksa untuk mempertontonkan penggelapan kepala di korban di depan pagar rumahnya. Perlakuan barbar itu dilakukan tanpa prosesi hukum dan banyak di antara korban sebenarnya tidak terlibat dalam prostitusi.

2. Perkosaan
   Untuk mendapatkan informasi rezim Saddam memperkosa perempuan anggota keluarga sang oposan, mengintimidasi anggota kelompok oposisi dengan mengirim orang rekaman video yang berisi perkosaan terhadap perempuan anggota keluarga yang oposan tersebut dan mengancam agar mau bekerjasama dengan rezim.

3. Penyiksaan
   Saddam telah menyiksa dan memburuk perempuan pembangkang yang bersepakatan dengan rezim atau perempuan keluarga oposan. Bahkan anak-anak dipenjarakan jika mereka atau orang tua mereka tidak mendukung rezim Saddam. Di penjara para perempuan mengalami banyak penyiksaan, pukulan secara brutal, perkosaan sistematis atau tubuhnya dialiri listrik.

4. Pembunuhan
   Pada tahun 1990 Saddam Hussein memberlakukan pasal 111 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Irak. Pasal ini membatasi laki-laki dari hukuman apapun seandainya membunuh anggota keluarga mereka yang perempuan jika pembunuhan itu bertujuan untuk memperolehkan kehormatan

kolanya dari hukuman. Dilaporkan lebih dari 4.000 perempuan telah menjadi korban dari apa yang disebut sebagai "pembunuhan demi kehormatan (honor killings)" sejak pasal itu diterapkan.


Perempuan lain, Safia Al Souhali yang ayahnya dibunuh oleh rezim Saddam pada tahun 1994 mengisahkan kekejaman rezim Saddam Hussein:

"Iraq under Saddam's regime has become a land of hopelessness, sadness and fear. A country where people are ethnically cleansed... rape is systematic... congenital malformation, birth defects, infertility, cancer and various disorders are the results of Saddam's gassing of his own people... the killing and torturing of husbands..."

Perempuan merupakan kontributor yang penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu masyarakat. Mereka berperan dalam sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, politik, dan lainnya. Perempuan harus diberi peluang untuk berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat.

Perempuan harus diberi hak untuk berpikir, berbicara, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Perempuan harus diberi kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Perempuan harus diberi kebebasan untuk memilih pekerjaan, penghasilan, dan kehidupan pribadi.

Perempuan harus diperlakukan dengan adil dan dihargai karena perannya dalam masyarakat. Mereka harus diberi hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan diberi kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Perempuan harus diberi kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Perempuan harus diberi kebebasan untuk memilih pekerjaan, penghasilan, dan kehidupan pribadi.

Perempuan harus diperlakukan dengan adil dan dihargai karena perannya dalam masyarakat. Mereka harus diberi hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan diberi kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Perempuan harus diberi kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Perempuan harus diberi kebebasan untuk memilih pekerjaan, penghasilan, dan kehidupan pribadi.

Perempuan harus diperlakukan dengan adil dan dihargai karena perannya dalam masyarakat. Mereka harus diberi hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan diberi kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Perempuan harus diberi kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Perempuan harus diberi kebebasan untuk memilih pekerjaan, penghasilan, dan kehidupan pribadi.

Perempuan harus diperlakukan dengan adil dan dihargai karena perannya dalam masyarakat. Mereka harus diberi hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan diberi kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Perempuan harus diberi kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Perempuan harus diberi kebebasan untuk memilih pekerjaan, penghasilan, dan kehidupan pribadi.

Perempuan harus diperlakukan dengan adil dan dihargai karena perannya dalam masyarakat. Mereka harus diberi hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan diberi kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Perempuan harus diberi kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Perempuan harus diberi kebebasan untuk memilih pekerjaan, penghasilan, dan kehidupan pribadi.

Perempuan harus diperlakukan dengan adil dan dihargai karena perannya dalam masyarakat. Mereka harus diberi hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan diberi kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Perempuan harus diberi kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Perempuan harus diberi kebebasan untuk memilih pekerjaan, penghasilan, dan kehidupan pribadi.

Perempuan harus diperlakukan dengan adil dan dihargai karena perannya dalam masyarakat. Mereka harus diberi hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan diberi kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Perempuan harus diberi kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Perempuan harus diberi kebebasan untuk memilih pekerjaan, penghasilan, dan kehidupan pribadi.
Feminisasi Politik Internasional?


Dalam konferensi itu, seorang aktivis perempuan dari Palestina, Henda Atraj, menyatakan bahwa perempuan telah menjadi korban kekerasan dalam konflik konflik. Mereka telah menjadi korban kekerasan dalam konflik, termasuk dalam konflik konflik terkait kekerasan terhadap perempuan.

Dalam situasi perang, perempuan diperlakukan dengan adil dan dihakimi oleh pihak-pihak yang didukung oleh Amerika Serikat. Media internet telah digunakan Amerika untuk memosisikan Saddam Hussein sebagai pengekang kekerasan rezim Saddam dalam berbagai situs internet yang menunjukkan kasus-kasus terhadap perempuan.

Tidak bisa diingat, bahwa hingga sekarang, perempuan di dunia masih diabaikan oleh dunia internasional. Mereka telah menjadi korban kekerasan dalam konflik konflik, termasuk dalam konflik konflik terkait kekerasan terhadap perempuan.

Dalam situasi perang, perempuan diperlakukan dengan adil dan dihakimi oleh pihak-pihak yang didukung oleh Amerika Serikat. Media internet telah digunakan Amerika untuk memosisikan Saddam Hussein sebagai pengekang kekerasan rezim Saddam dalam berbagai situs internet yang menunjukkan kasus-kasus terhadap perempuan.

Tidak bisa diingat, bahwa hingga sekarang, perempuan di dunia masih diabaikan oleh dunia internasional. Mereka telah menjadi korban kekerasan dalam konflik konflik, termasuk dalam konflik konflik terkait kekerasan terhadap perempuan.
menunjukkan bahwa kehidupan perempuan yang dalam tradisi klasik ilmu hubungan internasional diletakkan di tempat kedua dan dianggap tidak penting ternyata telah digunakan oleh Amerika sebagai "senjata" untuk memecahkan Saddam Hussein. Dari fenomena ini bisa diambil pelajaran bahwa persoalan perempuan yang sering kali diremehkan dalam studi hubungan internasional justru berperan penting dalam konflik Irak-Amerika, karena telah digunakan oleh Amerika sebagai "senjata" untuk memecahkan Saddam Hussein. Di sinilah penelitian Jones (1996) persoalan-persoalan perempuan yang sering dihafal bersifat pribadi itu sebenarnya bersifat politik dan internasional. Seiring dengan penelitian-an itu semestinya maka "the political" juga berubah setelah melihat pengalaman-pengalaman perempuan.

Penutup

Pasca krisis Irak mungkin Amerika sangat lega karena telah berhasil menenangkan perpepran dengan Saddam Hussein, baik perang secara fisik dengan menggunakan senjata massa perang politik-psikologis dan perang simbolik melalui pemantapan-pemutahaan di mediar internet. Amerika juga boleh bangga mengingat kaum perempuan Irak berterimakasih kepada Amerika karena telah menyalahkan rezim Saddam yang keji terhadap perempuan. Terlebih lagi pasca krisis, kaum perempuan Irak menunjukkan harapan agar Amerika membantu mereka dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang belum mereka nikmati selama masa pemerintahan Saddam Hussein.


Daftar Pustaka


(2003), Women in Iraq, didownload dari http://www.state.gov/g/wrls/cfs/1381.htm


Surat Kabar


Syeirazi, M. Kholid, ‘Dilema Praktik Globalisme Neo-Liberal,’ Volume 7, No 1, Maret 2003, halaman 1-34.


Winanti, Poppy, Developmental State dan Tantangan Globalisasi: Studi Kasus Korea Selatan Volume 7, No 2, November 2003, halaman 175 - 204.


---

FORMULIR BERLANGGANAAN JSP

Mohon dicatat sebagai pelanggan JSP:

Nama : 
Alamat :
Kode Pos :
E-mail :

Harga Langganan mulai Vol. 7, No. 1, Juli 2003 Rp 60.000,- untuk 1 tahun

FORMULIR INI BOLEH DIKOPI